

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki dekade 2020-an, peta persaingan investasi internasional di kawasan Asia Tenggara mengalami pergeseran signifikan dari manufaktur tradisional menuju integrasi teknologi digital. Laporan investasi ASEAN 2020-2021 (ASEAN & UNCTAD, 2021) mencatat bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19, arus *foreign direct investment* (FDI) ke sektor ekonomi digital dan industri berbasis Revolusi Industri 4.0 justru menunjukkan resiliensi yang tinggi. Fenomena ini menandai transformasi peran investor asing yang kini bertindak sebagai katalisator pembangunan ekosistem inovasi, melalui pendirian pusat riset dan pengembangan R&D serta adopsi solusi manufaktur tingkat lanjut di negara-negara tuan rumah. Negara-negara berkembang mulai menggeser fokus kebijakan mereka untuk menarik investasi berkualitas yang mampu meningkatkan posisi mereka dalam rantai nilai global (ASEAN & UNCTAD, 2021).

Mengacu pada *global innovative index* (GII) 2025, Vietnam diklasifikasikan sebagai negara *lower middle income* top 3 bersama India, dan Filipina. 3 negara ini memiliki performa yang impresif dalam aspek inovasi nasional sebagaimana dimuat dalam (WIPO, 2025) (WIPO, 2025) (WIPO, 2025). Vietnam menunjukkan performa positif sebagai negara berpendapatan menengah-bawah *lower middle-income* yang secara konsisten melampaui ekspektasi inovasi

global. Berdasarkan data GII 2021 hingga 2025, Vietnam stabil menempati peringkat ke-44 dari 139 ekonomi dunia, yang menempatkannya di peringkat 2 dalam kelompok *lower middle income*. Namun dalam hal menghindari *middle income trap* (MIT), Vietnam memiliki performa terbaik. Hal ini ditunjukkan Berdasarkan data (GII) 2025, Vietnam memegang peringkat 1 dunia dalam dua indikator krusial *high-tech imports* dan *high-tech exports* (WIPO, 2021).

Tabel 1.1 Komparasi Performa 3 Negara *Lower Middle Income* terbaik

No	Pilar GII	Vietnam	India	Filipina
1	Institusi	51	54	72
2	Sumber Daya Manusia & Riset	61	46	77
3	Infrastruktur	53	75	74
4	Kepuasan Pasar	40	28	80
5	Kepuasan Bisnis	47	61	37
6	Output Pengetahuan & Teknologi	34	23	31
7	Output Kreatif	44	45	56
	Peringkat Keseluruhan (GII 2025)	44	38	50

Sumber: (WIPO, 2025)

MIT dicetuskan oleh Gill dan Kharas (2007). Istilah ini merujuk pada negara-negara yang telah berkembang hingga tingkat pendapatan per kapita tertentu tetapi tetap stagnan setelahnya. Kunci untuk melampaui jebakan ini bukanlah sekadar akumulasi modal, melainkan pertumbuhan yang didorong oleh *Total Factor Productivity (TFP)*. Dalam hal TFP sektor *high-tech* adalah katalisator yang memungkinkan Vietnam mematahkan pola pertumbuhan stagnan khas MIT (Tho, 2023).

Landasan institusional bagi transformasi kebijakan investasi asing Vietnam secara eksplisit tertuang dalam Resolusi No. 50-NQ/TW 2019 yang diterbitkan oleh Biro Politik Komite Pusat Partai Komunis Vietnam. Dokumen strategis ini menandai pergeseran paradigma fundamental dari sekadar mengejar kuantitas investasi menuju pendekatan yang lebih selektif, berkualitas, dan berkelanjutan. Setelah tiga dekade implementasi kebijakan *Doi Moi*, pemerintah menyadari perlunya penguatan kualitas kerja sama investasi asing yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam modernisasi industri dan penguatan kapasitas teknologi nasional hingga tahun 2030 (Luatvietnam, 2019).

Resolusi tersebut menetapkan prioritas utama pada penarikan proyek-proyek FDI yang mengintegrasikan teknologi tinggi, manajemen modern, dan nilai tambah yang lebih besar. Secara spesifik, kebijakan ini menginstruksikan adanya mekanisme insentif yang lebih terarah bagi investor global yang berkomitmen untuk melakukan transfer teknologi serta mendirikan pusat R&D di wilayah Vietnam. Fokus strategis ini bertujuan untuk membangun keterkaitan *linkages* yang lebih kuat antara perusahaan multinasional dengan sektor industri domestik, guna memastikan terjadinya *knowledge spillover* yang efektif bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal (Luatvietnam, 2019).

Salah satu bentuk pergeseran fokus kebijakan yang dilakukan Vietnam adalah penetapan Visi 2045 untuk bertransformasi menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Periode 2021-2025 menjadi fase krusial untuk memperkuat fondasi ekonomi melalui modernisasi industri dan peningkatan kapasitas inovasi

domestik ditandai dengan adanya *Socio-Economic Development Plan 2021-2025* (SEDP). Fase ini merupakan fase awal untuk menghindari MIT. Vietnam harus melakukan lompatan struktural menuju *knowledge-based economy* guna menghindari MIT, mengingat model pertumbuhan berbasis upah buruh rendah tidak lagi berkelanjutan (Tho, 2023).

Berbagai studi mengenai strategi ekonomi Vietnam menyoroti peran krusial investasi asing dalam memacu transformasi industri nasional. Salah satu kajian oleh (Pham et al., 2022) menemukan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah, terutama melalui insentif strategis, telah berperan penting dalam memfasilitasi pengembangan teknologi pada industri elektronika dengan mendorong transisi dari sekadar kegiatan perakitan menuju aktivitas yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. (Nguyen & Truong, 2021) mengkaji hubungan antara arus modal masuk dengan partisipasi Vietnam dalam Rantai Nilai Global (GVC), di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penarikan investasi asing secara signifikan memperkuat keterkaitan hulu dan hilir industri domestik di pasar internasional. Selain itu, dampak tata kelola dan lingkungan perdagangan terhadap arus investasi juga dijelaskan dalam penelitian Kayani et al. (2024), yang menyoroti bahwa stabilitas kelembagaan dan keterbukaan ekonomi merupakan faktor determinan utama dalam mempertahankan daya tarik investasi di kawasan ASEAN, khususnya bagi Vietnam. Meskipun kajian terdahulu telah banyak meneliti dampak kebijakan ekonomi dan aliran modal secara umum, namun penelitian ini mengisi celah untuk menganalisis bagaimana strategi pemerintah yang spesifik dalam menarik FDI padat R&D akan memberikan pemahaman mendalam mengenai upaya negara

untuk menghindari jebakan pendapatan menengah melalui penguatan kapasitas inovasi nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi pemerintah Vietnam dalam menarik FDI padat R&D sektor hi-tech pada tahun 2021-2025?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui strategi pemerintah Vietnam dalam menarik FDI padat R&D sektor hi-tech pada tahun 2021-2025.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dilaksanakan penelitian ini secara umum untuk memenuhi syarat akademik untuk mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah Vietnam dalam menarik FDI padat R&D sektor hi-tech pada tahun 2021-2025. Penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis secara detail instrumen kebijakan utama yang ditujukan untuk merangsang FDI padat R&D ke dalam Vietnam. Sehingga akan menunjukkan upaya Vietnam dalam mewujudkan SEDP 2021-2025. Dengan ini penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru tentang strategi pemerintah negara dalam mempengaruhi perilaku aktor FDI padat R&D sektor hi-tech.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Strategi Pemerintah untuk menarik FDI Padat R&D

Upaya menarik FDI padat R&D dapat dilakukan melalui kebijakan inovasi dan promosi penanaman modal asing (PMA). Peran kebijakan inovasi adalah untuk meningkatkan iklim investasi untuk R&D dengan mengidentifikasi dan menindaklanjuti kekuatan dan kelemahan sistem inovasi nasional, sementara peran promosi PMA adalah untuk meningkatkan citra negara sebagai lokasi R&D dan menyediakan layanan yang ditargetkan kepada investor asing potensial dan yang sudah ada di bidang R&D (Guimon, 2009). Aktor utama yang berperan adalah pemerintah dan lembaga pemerintah, agensi promosi investasi/*investment promotion agency* (IPA), perusahaan multinasional dan investor asing, universitas dan pusat riset, serta masyarakat dan tenaga kerja spesialis. Setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi dan saling bergantung, mulai dari pemerintah yang menetapkan arah kebijakan, IPA yang menjalankan promosi dan layanan investasi, institusi akademik yang mengembangkan kompetensi dan infrastruktur. Sementara itu perusahaan dan stakeholder industri berperan sebagai pengguna dan pelaku utama inovasi. (Guimon, 2009).

Tabel 1.2 Kerangka Konsep

Area Kebijakan	Kebijakan Utama
Kebijakan Inovasi	Insentif fiskal dan finansial untuk R&D perusahaan
	Pengembangan sumber daya manusia dan penarikan talenta asing
	Penguatan infrastruktur riset serta mendorong kolaborasi dan <i>linkages</i>
	Improvisasi rezim hak kekayaan intelektual

Promosi Penanaman Modal Asing (PMA)	Penargetan FDI Padat R&D dan pembangunan citra negara sebagai lokasi R&D
	Penyediaan layanan pra-investasi dan implementasi khusus R&D
	Pengutamaan pada layanan purna-investasi
	Advokasi kebijakan

Sumber: (Guimon, 2009)

1.4.1.1 Kebijakan Inovasi

Segmen pertama dalam kebijakan inovasi adalah insentif fiskal dan keuangan. Kebijakan ini bertujuan memposisikan negara sebagai lokasi R&D yang kompetitif dengan mengurangi biaya operasional perusahaan multinasional (MNEs) melalui skema kredit pajak, pembebasan tarif impor, hingga hibah langsung. Lembaga Promosi Investasi (IPA) berperan krusial di sini sebagai mediator yang memfasilitasi pengajuan insentif tersebut bagi investor asing. Insentif fiskal adalah salah satu kebijakan yang umum diterapkan untuk menunjang suatu negara agar dinilai sebagai lokasi yang ideal untuk R&D (Guimon, 2009).

Selain insentif, ketersediaan modal manusia (*human capital*) level internasional menjadi aspek krusial. Pemerintah perlu mereformasi regulasi imigrasi dan menyediakan beasiswa STEM untuk memperluas basis talenta. Pemerintah juga bisa mendukung universitas dan lembaga riset untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mobilitas internasional, sementara MNEs berkontribusi dalam mengartikulasikan kebutuhan standar tenaga kerja yang diinginkan. Transformasi dari *brain drain* menjadi *brain circulation* menjadi target utama agar sistem inovasi nasional mendapatkan manfaat optimal dari peneliti nasional yang kembali dari luar negeri (Guimon, 2009).

Selanjutnya, infrastruktur riset dan penguatan kolaborasi (*linkages*) menjadi pertimbangan utama investor. Kebijakan ini tidak hanya terbatas pada pembangunan laboratorium atau taman teknologi, tetapi juga penyediaan layanan *hosting* riset dan dukungan administratif. Pemerintah perlu memiliki kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur penelitian negara, seperti pusat penelitian publik, dan taman teknologi. Menarik FDI padat R&D membutuhkan kebijakan seperti menawarkan layanan hosting penelitian kepada perusahaan asing melalui taman teknologi, yang dapat mencakup ruang kantor bersubsidi, layanan administratif, dan dukungan dalam meminta insentif dari pemerintah. Keberhasilan tahap ini bergantung pada sinergi antara sektor publik dan swasta untuk memaksimalkan transfer teknologi. Tingkat *linkages* yang tinggi dalam sistem inovasi nasional diperlukan untuk memaksimalkan transfer teknologi dan juga dapat menjadi hal yang penting bagi keberlanjutan dan peningkatan investor R&D asing yang sudah berada di negara tersebut (Guimon, 2009).

Selanjutnya, pengembangan rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang transparan sangat penting untuk memitigasi risiko pencurian teknologi. Selain penegakan hukum oleh pemerintah, perlu menyediakan pelatihan manajemen HKI, sementara praktisi hukum memastikan layanan perlindungan yang efisien bagi inovasi MNEs (Guimon, 2009). Kebijakan ini merespon perspektif investor yang menilai pengalihan R&D ke luar negeri berpotensi menghilangkan kendali atas R&D dan risiko pencurian HKI. Untuk merangsang aktivitas paten perusahaan, instrumen yang digunakan oleh beberapa negara seperti Spanyol dan Irlandia adalah menawarkan insentif keuangan atau fiskal untuk menutupi biaya paten atau mengurangi pajak atas pendapatan dari lisensi paten, yang berpotensi menarik bagi

investor asing di bidang R&D. Pemerintah juga harus berupaya memastikan bahwa pelatihan keterampilan yang memadai di bidang HKI tersedia di negara tersebut, misalnya dengan mensponsori seminar dan kursus khusus HKI, dan dengan merekomendasikan firma hukum dan konsultan khusus yang dapat dihubungi oleh investor asing (Guimon, 2009).

1.4.1.2 Promosi Penanaman Modal Asing (PMA)

Dalam promosi PMA, pemerintah bisa berupaya dengan membuat kebijakan yang menargetkan FDI padat R&D dan membangun citra negara sebagai lokasi R&D. Kebijakan ini bertujuan untuk secara aktif mempromosikan dan menarik investasi asing yang berfokus pada R&D. Penargetan FDI padat R&D ini dikelola oleh IPA yang bekerja sebagai representasi pemerintah. Selain itu, pemerintah berupaya membangun citra negara sebagai pusat R&D yang kompeten dan menarik, melalui promosi, branding, dan pengembangan reputasi sebagai lokasi unggul dalam inovasi dan teknologi tinggi (Guimon, 2009).

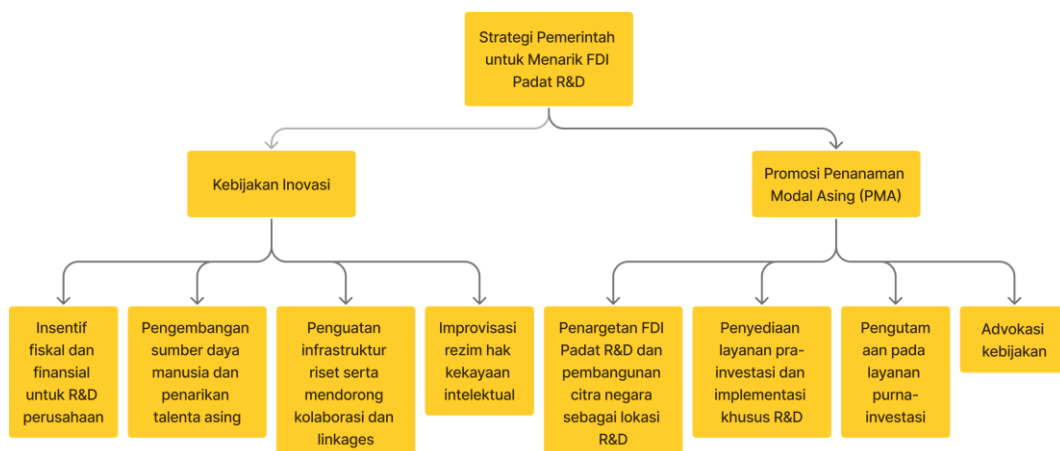
Kebijakan selanjutnya yang bisa menunjang promosi suatu negara adalah penyediaan layanan pra-investasi dan implementasi khusus R&D. Kebijakan ini meliputi penyediaan layanan khusus oleh IPA yang mendukung proses investasi R&D, mulai dari tahapan awal perencanaan, studi kelayakan, hingga pelaksanaan investasi. Layanan ini meliputi konsultasi, fasilitasi perizinan, insentif khusus, dan dukungan administratif yang memudahkan perusahaan asing dalam memulai dan menjalankan kegiatan R&D di negara tersebut. IPA juga mempersiapkan kunjungan investor potensial ke negara tersebut, termasuk kunjungan ke pusat

R&D, universitas, taman teknologi, dan pertemuan dengan pejabat pemerintah serta pemasok atau mitra potensial (Guimon, 2009).

Pengutamaan pada layanan purna-investasi juga perlu diperhatikan. Kebijakan ini menekankan pentingnya layanan purna investasi, yaitu dukungan dan layanan lanjutan dari IPA setelah investasi dilakukan. Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan, pengembangan, dan peningkatan kegiatan R&D oleh perusahaan asing yang berinvestasi, serta menjaga hubungan baik dan memudahkan ekspansi atau upgrade kegiatan R&D mereka di masa mendatang (Guimon, 2009). Adapun IPA juga berperan penting dalam advokasi kebijakan. Kebijakan ini fokus pada promosi dan advokasi kebijakan yang mendukung kegiatan R&D. Pemerintah melalui IPA berperan dalam mendorong kerjasama, memperjuangkan regulasi yang kondusif, serta mengatasi hambatan legal atau birokrasi yang mungkin menghambat iklim investasi dan inovasi di negara tersebut (Guimon, 2009).

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran



Sumber: Penulis

Mengacu pada konsepsi Jose Guimón (Guimon, 2009), strategi pemerintah untuk menarik FDI padat R&D dapat dijelaskan melalui integrasi dua pilar kebijakan yang saling berkesinambungan. Kedua pilar tersebut mengarah pada koordinasi strategis antara kebijakan inovasi dan promosi PMA. Berdasarkan kerangka ini, strategi tata kelola dipahami sebagai suatu proses sistemik yang menghubungkan penyediaan insentif riset domestik, pemasaran keunggulan lokasi kepada investor global, serta pendampingan operasional investor untuk memastikan terjadinya transfer teknologi yang berkelanjutan. Pilar kebijakan inovasi bekerja melalui instrumen insentif publik bagi R&D swasta, baik dalam bentuk skema fiskal maupun finansial, serta investasi publik langsung pada infrastruktur sains dan teknologi nasional. Pilar promosi PMA diwujudkan melalui upaya penentuan target investor secara selektif dan penyediaan keunggulan lokasi yang kompetitif guna menarik unit-unit penelitian perusahaan multinasional ke dalam ekosistem domestik. Integrasi kedua aspek ini secara kolektif berfungsi untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif bagi percepatan transformasi industri berbasis pengetahuan di negara tuan rumah.

1.6 Argumentasi Utama

Penulis berargumen bahwa kebijakan-kebijakan inovasi Vietnam dalam kerangka SEDP 2021-2025 merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk mentransformasi struktur ekonomi nasional melalui penarikan FDI yang memiliki intensitas R&D tinggi di sektor *hi-tech*. Strategi ini diimplementasikan melalui penguatan regulasi yang memberikan landasan hukum bagi pemberian insentif fiskal progresif dan fasilitas khusus bagi investor global yang bersedia memindahkan unit inovasinya ke Vietnam. Kebijakan tersebut diarahkan untuk

menggeser ketergantungan industri dari model manufaktur padat karya menuju ekosistem berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap aliran modal asing yang masuk tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan PDB, tetapi juga berfungsi sebagai pemicu penguatan kapasitas riset dan pengembangan teknologi orisinal di dalam negeri.

Dalam aspek promosi PMA, Vietnam melakukan reorientasi strategi ekonomi dengan memfokuskan pada penyediaan keunggulan lokasi yang mampu mendorong integrasi lebih dalam ke dalam Rantai Nilai Global. Langkah ini diwujudkan melalui pengembangan kawasan strategis seperti *hi-tech parks* di pusat-pusat ekonomi utama yang dirancang sebagai pusat inkubasi bagi operasional pusat R&D multinasional. Melalui penyediaan infrastruktur teknologi dan ketersediaan talenta teknis yang terspesialisasi, pemerintah berupaya menciptakan keterkaitan (*linkages*) yang lebih kuat antara perusahaan global dengan industri domestik. Strategi promosi selektif ini merupakan langkah eksistensial bagi Vietnam untuk melampaui jebakan pendapatan menengah (*Middle-Income Trap*) dengan cara mengubah posisi tawarnya dari sekadar pusat perakitan hilir menjadi pusat inovasi regional yang kompetitif di kancah internasional pada periode 2021-2025.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan memberikan fenomena yang ada dan fakta dengan detail. Dalam studi HI, penelitian deskriptif berfungsi untuk memetakan realitas politik yang kompleks. Hal ini melibatkan pengumpulan

data yang detail untuk mengidentifikasi pola atau karakteristik dari subjek penelitian (Lamont, 2022).

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini didasarkan pada periodeisasi resolusi SEDP Vietnam 2021-2025. Periode ini menjadi masa awal Vietnam dalam Menari FDI padat R&D sektor hi-tech.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *document-based research* dan *digital research*. Teknik ini mengandalkan berbagai macam dokumen, mulai dari surat pribadi, dokumen resmi pemerintah atau perusahaan, hingga dokumen yang disusun oleh organisasi seperti partai politik, organisasi masyarakat sipil, atau bahkan kelompok bersenjata non-negara (Lamont, 2022).

Tabel 1.3 Sumber Data Penelitian

No	Komponen Indikator	Nama Dokumen Temuan
1	Insentif fiskal dan finansial untuk R&D perusahaan	<i>Decision-29-2021-QĐ-TTg; Ministry of Planning and Investment Report on FDI</i>
2	Pengembangan sumber daya manusia dan penarikan talenta asing	<i>569_QĐ-TTg_515010_Science Tech Innovation strategy</i>
3	Penguatan infrastruktur riset serta mendorong kolaborasi dan <i>linkages</i>	<i>569_QĐ-TTg_515010_Science Tech Innovation strategy</i>
4	Improvisasi rezim hak kekayaan intelektualImprovisasi rezim hak kekayaan intelektual	<i>Law No 07_2022_QH15; WIPO GII INDEX;</i>
5	Penargetan FDI Padat R&D dan pembangunan citra negara sebagai lokasi R&D	<i>Decision-667-QĐ-TTg; Ministry of Planning and Investment Report</i>

6	Penyediaan layanan pra-investasi dan implementasi khusus R&D	<i>Portal National Foreign Investment Information System Vietnam</i>
7	Pengutamaan pada layanan purna-investasi	<i>1242_QĐ-TTg_481740; Vietnam Provincial Competitiveness Index 2024</i>
8	Advokasi kebijakan	<i>Annual report Vietnam BusinessForum 2025</i>

Sumber: Penulis

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data Kualitatif adalah teknik analisis data yang bergantung pada pengumpulan artefak sosial non-numerik dan interpretasi fenomena, entitas, atau peristiwa sosial (Lamont, 2022). Adapun temuan dokumen peraturan yang dianalisis di bab ini yakni, Decision-667-QĐ-TTg, Decision 1242_QĐ-TTg_481740, dan Decision No. 29/2021/QĐ-TTg hanya tersedia dalam bahasa Vietnam. Kondisi tersebut menjadi batasan bagi penulis, sehingga perlu memanfaatkan AI sebagai metode analisis. Penulis menggunakan aplikasi “ChatPDF” untuk mengekstraksi data dalam dokumen tersebut (LuatVietnam, 2022) (Thu Vien Phap Luat, 2021).

1.8 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam penelitian ini disusun dengan memberikan gambaran keseluruhan isi dari Bab I hingga Bab IV. adapun susunan sistematika dengan berikut.

Bab I berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, sintesa pemikiran, argumentasi utama, dan juga metode yang digunakan untuk menganalisis

Bab II berisi uraian tentang analisis segmen *innovation policy* dari Strategi Pemerintah Vietnam dalam Menarik R&D Intensive FDI Sektor Hi-Tech Pada Tahun 2021-2025

Bab III berisi uraian tentang analisis segmen *inward investment promotion* dari Strategi Pemerintah Vietnam dalam Menarik R&D Intensive FDI Sektor Hi-Tech Pada Tahun 2021-2025

Bab IV menafsirkan kesimpulan dalam pemetaan yang dibahas dalam Bab II dan juga Bab III dan penambahan pengembangan penulis untuk memberikan masukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya dalam masa mendatang.